

Kurikulum Merdeka Belajar: Dinamika Guru dalam Proses Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Haposan Simanjuntak¹, Lismawati Simarmata², Yulidartini Batee³, Soriani Gulo⁴, Srianti Hutabarat⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Teologi REAL Batam, Batam, Indonesia

¹Haposanmei2018@gmail.com

²lismawatisimarmata22@gmail.com

³yulidartini555@gmail.com

⁴gulosoriani6@gmail.com

⁵srianti.hutabarat@gmail.com

ABSTRAK

Kurikulum merdeka belajar menjadi produk pendidikan yang mengembirakan karena semakin menciptakan ruang kebebasan bagi anak didik dalam menggali potensi dirinya. Namun disatu sisi juga mengakibatkan masalah bagi masyarakat, sekolah dan terkhusus guru sebagai implementator sebab terkesan buru-buru karena ketidaksiapan infrastruktur, SDM dan biaya. Dengan menggunakan metode studi literatur dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan membandingkan dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk menemukan problem dan solusi atas kebijakan kurikulum merdeka Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan sekolah belum sepenuhnya sanggup untuk melaksanakan segala prinsip dan nilai dari kurikulum merdeka belajar tersebut disebabkan kesejangan kualitas antar sekolah, ketidakseragaman standar pendidikan, kesulitan dalam monitoring evaluasi, kesiapan guru serta keterbatasan sumber daya dan finansial. Hal ini justru menimbulkan masalah baru sehingga hasil tidak maksimal seperti yang diharapkan oleh sebab itu perlu pembenahan yang secepatnya di dalam berbagai sektor. Seperti pemberian dukungan dan sumber daya tambahan, pengembangan kurikulum bersama, penambahan infrastruktur teknologi digital serta pelatihan dan pengembangan kompetensi guru.

Kata Kunci: Dinamika, Kurikulum Merdeka Belajar, Implementasi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Penulis Korespondensi:

Haposan Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi REAL Batam

Gedung Kampus Eden Park, Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Kepulauan Riau

Haposanmei2018@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Era ini ditandai oleh semakin kuatnya penggunaan teknologi digital, kecerdasan buatan, otomatisasi, serta keterhubungan antara sistem fisik, digital, dan biologis dalam berbagai bidang industri. Bahkan saat ini dunia mulai memasuki pembahasan mengenai era society 5.0, yaitu suatu tatanan masyarakat yang menempatkan teknologi cerdas sebagai bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Kemajuan tersebut memberikan banyak manfaat, seperti meningkatnya efektivitas kerja, produktivitas, kecepatan layanan, dan kualitas hidup masyarakat. Namun di sisi lain, perubahan ini juga menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam menghadapi situasi tersebut, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa depan. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan pengembangan kurikulum agar proses pendidikan tidak tertinggal oleh perubahan sosial dan teknologi. Di Indonesia, perubahan kurikulum telah terjadi beberapa kali sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman pada setiap periodenya. Kurikulum yang terbaru saat ini dinamai dengan Kurikulum Merdeka Belajar dan “*launching*” pada tanggal 1 Februari 2021 oleh Menteri Pendidikan, riset dan teknologi untuk mengganti Kurikulum 13. Awal penerapan dilaksanakan di Tahun Ajaran 2021/2022 pada 2.500 sekolah yang tersebar di 34 provinsi dan 111 kabupaten/kota Sebagai “pilot project”. Kurikulum ini diyakini pemertintah akan menghasilkan peserta didik yang unggul dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Peserta didik diharapkan bukan lagi hanya sebagai objek tapi akan menjadi subjek penggerak dunia pekerjaan. Prinsip mendasar yang dibangun adalah kemerdekaan berpikir dimana pendidik dan peserta didik dapat secara leluasa dan menyenangkan mengeksplorasi ketrampilan, pengetahuan dan sikap untuk menggali potensi diri sehingga menjadi manusia yang mandiri.

Perubahan dunia pendidikan di era modern menuntut guru untuk memiliki kemampuan yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang aktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam penguasaan strategi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Guru dituntut mampu merancang proses pembelajaran yang menarik sejak awal hingga akhir kegiatan belajar. Suasana belajar yang menyenangkan dapat membantu siswa lebih termotivasi, aktif berpartisipasi, serta tidak merasa terbebani selama mengikuti pembelajaran. Kreativitas dan inovasi guru dalam memilih metode, media, serta teknologi yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan di kelas. E-learning adalah system pembelajaran yang pelaksanaannya di dukung oleh jasa dari teknologi seperti sekarang ini, teknologi seperti internet, computer maupun video-audio (Jamun, 2018). Mendesain pembelajaran dengan metode yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan segala hal tersebut maka diyakini akan memnciptakan suasana Belajar yang menarik dan tidak monoton. Dengan perubahan kebijakan itu, guru di dorong untuk beradaptasi dengan cepat dan ekstrim. Sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya seperti ketidaksiapan infrastruktur atau sumber daya yang memadai seperti akses internet, peralatan teknologi, materi ajar yang relevan. Banyak daerah di Indonesia yang belum menyediakan segala fasilitas ini terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu keterbatasan ketrampilan guru dalam menggunakan teknologi berbasis digital. Sehingga mereka memerlukan pelatihan-pelatihan tambahan agar mampu dengan baik untuk mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar sehari-hari.

Perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan sering kali membawa tantangan yang cukup besar bagi para guru. Kehadiran Kurikulum Merdeka, misalnya, tidak hanya menuntut perubahan dalam sistem pembelajaran, tetapi juga mengharuskan guru menyesuaikan pola kerja dan pendekatan pengajarannya secara menyeluruh. Kondisi ini membuat sebagian guru mengalami tekanan psikologis karena harus beradaptasi dengan tuntutan baru dalam waktu yang relatif singkat. Banyak guru merasa belum memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi pemahaman konsep maupun keterampilan teknis dalam menerapkan kurikulum tersebut di kelas. Selain itu, proses penyesuaian membutuhkan energi dan waktu tambahan. Guru perlu menyusun kembali perangkat pembelajaran, mencari metode yang lebih sesuai, serta merancang sistem evaluasi yang berbeda dari sebelumnya. Beban administrasi dan tuntutan inovasi yang terus meningkat juga dapat memicu rasa lelah dan kejenuhan. Apabila tidak diimbangi dengan pelatihan, pendampingan, dan dukungan yang memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan stres yang berkepanjangan bagi tenaga pendidik. Deni dan Julia, menyebutkan dalam tulisannya bahwa sertifikasi sekalipun tidaklah menjamin kualifikasi ataupun kompetensi dari seorang pendidik (Suhandani & Kartawinata, 2014). Jadi kompetensi seorang guru atau pendidik mutlak adalah hasil proses latihan dari seorang pendidik secara pribadi yang memiliki kesadaran akan betapa pentingnya kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik yang hidup di era post modern. Baharudin, dalam tulisannya mengatakan guru merupakan sosok yang sangat penting dalam dunia pendidikan, keberadaan guru yang merupakan subjek yang sangat penting dalam dunia pendidikan (Baharudin, 2017). Agar anak didik dapat mencapai potensi dirinya maka di tuntut seorang guru yang memiliki kompetensi dalam profesinya tersebut. Untuk itu seorang guru di tuntut harus dapat menguasai secara menyeluruh dan minimal satu bidang keilmuan. Tedjawati, mengatakan karena hal tersebut merupakan tugas ataupun kedudukan dari seorang guru sebagai seorang tenaga profesional (Tedjawati, 2011). Jadi sangat miris ketika kita menemukan banyak pendidik atau guru tidak mempunyai kompetensi yang memadai dalam kehidupan pendidikan terkhususnya Pendidikan Agama Kristen di Bangsa Indonesia padahal setiap pendidik harus dapat memastikan pembelajarannya berkualitas (Sanjaya, 2016).

Namun situasi yang kita temukan di lapangan, dengan diterapkannya kurikulum merdeka belajar ini akan semakin menambah tantangan guru sehingga memperbesar persoalan guru di Indonesia di setiap jenjang. Bahkan berdasarkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya di SD Muhammadiyah Manyar Gresik dan SD Al-Amin Probolinggo, ditemukan beberapa hal terkait problematika penerapan Kurikulum Merdeka 2022 (Jannah, 2022). Tentunya dengan kondisi ini akan mengakibatkan tingkat dan kualitas pendidikan kita akan stagnasi dan tidak menutup kemungkinan menurun. Juga dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Sabriadi diyatakan bahwa "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan mendengarkan dan mempertimbangkan saran, masukan dari berbagai kalangan,... perlu dilakukan kajian secara mendalam terhadap karakteristik pendidikan di Indonesia, permasalahan pendidikan pada era sebelumnya, dan kondisi letak geografis yang berbeda-beda untuk dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan lanjutan (HR & Wakia, 2021). Untuk itu penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi pemerintah, lembaga pendidikan dan guru, agar memahami dinamika, problematika dan solusi dalam proses implementasi kurikulum merdeka belajar.

2. PEMBAHASAN

Dinamika Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Perubahan Pendidikan

Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari upaya transformasi pendidikan nasional untuk menjawab tantangan abad ke-21 dan perkembangan revolusi industri 4.0. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi, minat, dan bakat sesuai karakteristik masing-masing. Menurut Qomariyah Kurikulum Merdeka menempatkan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang bertugas menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik (Qomariyah, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan siswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tidak hanya berkaitan dengan perubahan dokumen pembelajaran, tetapi juga menuntut perubahan paradigma mengajar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suhandi yang menjelaskan bahwa guru menjadi faktor utama dalam keberhasilan kebijakan kurikulum karena guru berperan sebagai pelaksana sekaligus pengembang pembelajaran di kelas (Suhandi, 2022). Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat dipisahkan dari kesiapan kompetensi guru.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Jannah yang berfokus pada problematika penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat sekolah dasar tertentu (Jannah, 2022). Penelitian ini menyoroti dinamika guru secara lebih luas dengan melihat faktor kompetensi, kesenjangan sumber daya, integrasi teknologi, serta strategi kolaboratif yang diperlukan untuk mendukung implementasi kurikulum secara nasional.

Kesenjangan Sumber Daya Pendidikan sebagai Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka

Salah satu tantangan utama yang ditemukan adalah adanya kesenjangan sumber daya pendidikan antarwilayah. Teori pemerataan pendidikan menjelaskan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan lingkungan belajar. Anindito Aditomo mengungkapkan bahwa ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia masih terlihat jelas antara sekolah yang berada di daerah maju dan sekolah yang berada di daerah tertinggal (Anindito Aditomo, 2018). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki akses teknologi, pendanaan, dan sumber daya manusia yang memadai lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dibandingkan sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Winandar yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan (Winandar, 2022). Akibatnya, implementasi Kurikulum Merdeka berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas pembelajaran apabila tidak disertai kebijakan pemerataan sumber daya pendidikan. Selain itu, penelitian Komari dan Aslan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di wilayah perbatasan dan daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas pembelajaran dan akses teknologi (Komari et al., 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh desain kurikulum yang baik, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya.

Kompetensi Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Teori kompetensi guru menempatkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai faktor yang menentukan kualitas pembelajaran. Suhandani dan Kartawinata menjelaskan bahwa profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh sertifikasi, tetapi juga oleh kemampuan nyata dalam mengelola pembelajaran dan mengembangkan diri secara berkelanjutan (Suhandi, 2022). Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak guru masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, serta penyusunan modul ajar yang menjadi karakteristik Kurikulum Merdeka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Baharudin yang menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan syarat utama untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas (Parjaman, 2017).

Lebih lanjut, Tedjawati menjelaskan bahwa pengembangan profesional guru harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan, lesson study, dan komunitas belajar (Tedjawati, 2011). Oleh karena itu, implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan dukungan program peningkatan kompetensi yang sistematis agar guru mampu menjalankan peran sebagai fasilitator pembelajaran yang inovatif.

Integrasi Teknologi Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif. Menurut Jamun, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pembelajaran dari yang bersifat konvensional menjadi lebih terbuka dan interaktif (Jamun, 2018). Sementara itu, Agustian menyatakan bahwa teknologi pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk membangun pembelajaran kolaboratif dan memperluas akses terhadap sumber belajar (Agustian et al., 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi digital karena keterbatasan keterampilan maupun akses internet. Kondisi tersebut menghambat optimalisasi pembelajaran yang menjadi salah satu karakteristik utama Kurikulum Merdeka. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital guru menjadi kebutuhan mendesak agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif sesuai tuntutan era digital.

Kolaborasi Profesional sebagai Strategi Penguatan Implementasi Kurikulum

Teori komunitas belajar profesional menekankan pentingnya kolaborasi antarpendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nurhikmah menjelaskan bahwa Kelompok Kerja Guru (KKG) berperan penting dalam meningkatkan kompetensi pedagogik melalui kegiatan berbagi pengalaman, diskusi akademik, dan pengembangan perangkat pembelajaran (Nurhikmah, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar sekolah dan antar guru dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai kendala implementasi Kurikulum Merdeka. Temuan ini diperkuat oleh Parjaman (2017) yang menyatakan bahwa kolaborasi memungkinkan setiap pihak berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kerja sama yang terstruktur, sekolah dapat saling mendukung dalam penyusunan kurikulum operasional, pengembangan modul ajar, maupun pemecahan masalah pembelajaran.

Pelatihan Berkelanjutan dan Evaluasi Implementasi Kurikulum

Pengembangan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam keberhasilan perubahan kurikulum. Eliza menjelaskan bahwa pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan mampu meningkatkan profesionalisme guru dalam menghadapi perubahan kebijakan pendidikan (Eliza, 2022). Selain pelatihan, evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Laksono menyatakan bahwa evaluasi kurikulum berfungsi untuk mengukur ketercapaian tujuan pendidikan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses implementasi (Laksono, 2022). Oleh karena itu, pemantauan yang sistematis perlu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan agar berbagai kendala dapat segera diatasi melalui kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan hasil kajian dan teori-teori yang digunakan, dapat dipahami bahwa dinamika implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem pembelajaran, tetapi juga menyangkut kesiapan guru, pemerataan sumber daya pendidikan, integrasi teknologi, kolaborasi profesional, serta dukungan pelatihan yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan berbagai faktor tersebut sebagai satu kesatuan yang memengaruhi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka dari perspektif guru sebagai aktor utama perubahan pendidikan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan studi literatur sebagai metode utama dalam memperoleh dan mengembangkan data penelitian. Studi literatur adalah kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Katiningsih, 2015). Pendekatan ini menitikberatkan pada penelusuran berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku ilmiah, jurnal akademik, artikel penelitian, dokumen resmi, maupun karya-karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji. Melalui proses tersebut, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga melakukan proses membaca secara kritis, mencatat poin-poin penting, serta mengkaji kembali berbagai konsep dan teori yang memiliki hubungan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian berbasis studi literatur, keberadaan sumber pustaka menjadi fondasi utama dalam membangun arah dan kedalaman analisis. Oleh sebab itu, penyusunan latar belakang, pengembangan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, hingga proses pembahasan dilakukan melalui telaah konseptual terhadap berbagai pandangan para ahli dan hasil penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman yang sistematis, mendalam, dan akademis melalui integrasi berbagai sumber ilmiah yang saling mendukung.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pergantian kurikulum di Indonesia sudah terjadi beberapa kali dan prosesnya selalu menimbulkan prokontra, baik di kalangan masyarakat karena akan mengeluarkan biaya yang besar karena wajib mengganti buku pelajaran. Dampak ini juga dialami praktisi pendidikan karena akan mengubah kebijakan dalam sistem proses belajar mengajar. Kemudian kalau kita lihat ketika terjadi pergantian menteri hampir selalu dibarengi dengan pergantian kurikulum (Nasution, 2016). Hal ini mengindikasikan kebijakan pergantian kurikulum memiliki muatan politik dan terkesan dipaksakan tanpa mempertimbangkan kesiapan sekolah dan guru. Pendidikan diorientasikan menjadi sarana kepentingan ideologi dan politik untuk dikenang oleh sejarah republik Indonesia. Pendidikan bukan lagi untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, tetapi untuk membangun kekuatan dari partai politik praktis tertentu untuk kepentingan golongan atau pun kelompoknya sendiri (H.A.R, 2006). Pada prinsipnya jika sebuah kurikulum berubah merupakan hal yang baik karena memberikan jawaban atas tantangan global yang semakin kompleks. Namun di Indonesia perubahan kurikulum banyak yang terkesan dipaksakan tanpa persiapan dan pertimbangan yang matang. Karena tidak diimbangi dengan persiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan kekuatan pendanaan (finansial) yang baik. Keadaan ini jika tidak secepatnya di atasi akan menciptakan varian masalah-masalah baru sehingga menciderai maksud dan tujuan pendidikan yang begitu mulia itu.

Esensi kurikulum merdeka belajar adalah pendidikan yang berpatokan kepada pengalihan potensi, bakat dan minat dengan memberikan ruang kebebasan belajar. Konsep kurikulum merdeka belajar dirancang untuk mendorong indenpedensi guru dan anak didik untuk merancang model pembelajaran. Walaupun tujuannya mendorong dominasi fleksibilitas dengan mengakomodir keadaan sekitar, namun ada beberapa problematika yang timbul seiring dengan penerapan kurikulum tersebut. Kondisi geografis Indonesia yang sangat besar yang memiliki sekitar 514 kota dan sekitar 8.718 kecamatan pada tahun 2020. Sementara itu, jumlah desa di Indonesia mencapai sekitar 83.000. Menjadi tantangan yang sangat besar dalam melakukan perubahan kurikulum. Bahwa pada kenyataannya sekolah dasar di desa dan di kota memiliki perbedaan yang signifikan antara fasilitas sarana dan prasarana (Winandar, 2022). Belum lagi dengan mutu sekolah di Indonesia yang sangat beragam disebabkan kondisi geografis yang sangat luas, status administratif kota dan desa sangat begitu bervariasi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat, ada 436.707 sekolah di Indonesia pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. Jumlah sekolah yang sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah guru yang tersedia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), jumlah guru di Indonesia mencapai 3,36 juta orang pada semester ganjil tahun ajaran (TA) 2023/2024. Kurikulum Merdeka dapat menyebabkan kesenjangan kualitas antara sekolah di Indonesia. Sekolah dengan sumber daya dan dukungan yang lebih besar mungkin mampu mengembangkan kurikulum yang lebih kaya dan beragam, sementara sekolah dengan sumber daya yang lebih terbatas akan kesulitan dalam menyusun kurikulum yang sebanding. Kesenjangan antar sekolah itu nyata dan berdampak serius pada kualitas hasil belajar siswa (Anindito Aditomo, 2018). Sekolah yang menerima pendanaan yang lebih tinggi akan memiliki sumber daya yang sanggup untuk menopang perubahan program apapun, namun sekolah yang minim pendanaan tidak akan mampu untuk mengikuti perubahan apapun. Sekolah yang teletak di daerah dengan tingkat pendapatan tinggi akan lebih cepat menarik guru-guru yang berkualitas dan berpengalaman sehingga mampu dengan baik melakukannya. Sebaliknya sekolah yang kurang berkembang akan kesulitan untuk menarik dan mempertahankan guru-guru terbaik mereka.

Implementasi kurikulum merdeka membutuhkan kesiapan dan kapasitas guru serta tenaga pengajar untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum secara efektif. Guru merupakan jantung dari pendidikan, maka dari itu sebagus dan seefektif apapun kebijakan yang dibuat jika gurunya tidak memiliki penguasaan kompetensi dan pola pikir progresif maka kurikulum ini di maknai bukan sebagai sarana perubahan demi pendidikan yang lebih berkualitas (Suhandi, 2022). Keberagaman kompetensi guru akan menciptakan respon yang berbeda dengan kebijakan pemerintah tersebut. Guru dipedesaan dan di kota berbeda kemampuan kompetensinya. Keberhasilan dalam peningkatan kualitas pendidikan tergantung pada kualitas pendidik sehingga kebijakan kurikulum apapun yang akan digunakan tentunya perlu dikolaborasikan dengan kompetensi guru yang berkualitas (Suhandi, 2022). Siswa di daerah pedesaan lebih rendah kondisi social ekonominya sehingga guru di desa menghadapi tantangan yang berat dalam menimplementasikan kurikulum merdeka belajar karena berbagai akses yang minim. Beberapa guru akan mengalami kesulitan untuk menguasai dan menerapkan keterampilan dasar dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran di era digital seperti Microsoft Office yang menjadi hal dasar untuk dimiliki oleh seorang guru di era digital saat ini. Sedangkan, dalam pelaksanaannya, kurikulum merdeka belajar menuntut guru untuk kreatif dan inovatif dengan melibatkan kompetensi yang dimiliki (Qomariyah, 2022). Implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan investasi dalam pelatihan, bahan ajar, dan infrastruktur pendidikan yang dapat menjadi beban tambahan bagi sekolah yang sudah menghadapi keterbatasan tersebut. Dengan timbulnya masalah-masalah tersebut, berikut beberapa solusi yang perlu untuk dipertimbangkan.

4.1. Memberikan bantuan teknis

Pemerataan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil dan memiliki keterbatasan fasilitas. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas Teknologi (Komari et al., 2025). Banyak tenaga pendidik di wilayah tersebut harus bekerja dalam kondisi yang tidak ideal, mulai dari minimnya sarana belajar, akses teknologi yang terbatas, hingga kurangnya dukungan pengembangan profesional. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat hanya berfokus pada perubahan kurikulum, tetapi juga harus disertai dengan perhatian nyata terhadap kondisi sekolah dan guru di lapangan. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memastikan setiap sekolah memperoleh kesempatan yang sama dalam menyediakan layanan pendidikan yang layak. Dukungan dapat diberikan melalui bantuan operasional yang memadai, penyediaan media pembelajaran yang relevan, serta program pelatihan yang membantu guru mengembangkan keterampilan mengajar sesuai tuntutan zaman. Guru yang merasa didukung secara profesional dan sejahtera cenderung memiliki semangat kerja yang lebih baik dalam mendampingi peserta didik.

Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan jangka panjang. Ketika tenaga pendidik memperoleh penghargaan yang layak atas tanggung jawabnya, mereka akan lebih termotivasi untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan mampu

menjawab kebutuhan siswa di berbagai situasi sosial maupun perkembangan teknologi. Selain itu, peningkatan insentif dan penghargaan terhadap profesi guru juga dapat menjadi dorongan positif untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja maupun pengunduran diri akibat bertambahnya tuntutan dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Insentif merupakan suatu sarana motivasi yang dapat diberi sebagai perangsang atau pendorong yang diberikan kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi organisasi (Nusran, 2018). Penambahan insentif akan meningkatkan retensi guru yang berkualitas. Guru akan tetap bertahan dalam profesinya sehingga pengalaman dan kompetensinya teraplikasi dengan baik. Guru akan merasa dihargai dan dihormati sehingga terdorong motivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

4.2. Kolaborasi dengan sekolah lain dalam pengembangan model kurikulum

Mendorong sekolah-sekolah untuk berkolaborasi dan berbagi sumber daya dalam pengembangan kurikulum. Ini bisa dilakukan melalui kemitraan antar sekolah, program pertukaran guru, atau pengembangan kurikulum bersama dengan melibatkan stakeholder local. Sekolah harus meningkatkan nilai solidaritas dengan melakukan pertukaran ide, sumber daya, praktek dengan semangat gotong royong.

Kolaborasi antar guru atau yang biasa disebut dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) akan dapat membagikan pengalaman yang dirasakan sehingga akan memberikan informasi bagi sekolah yang lain. Kelompok kerja antar sekolah harus di bentuk dan ditingkatkan untuk mengidentifikasi proses praktek yang terbaik. Program-program yang diadakan KKG sangat membantu dalam peningkatan kemampuan pedagogik guru diantaranya pelatihan pembuatan KKM, RPP, Silabus dan praktek mengajar sehingga meningkat kualitas guru yang berkompeten, inovatif dan profesional. (Nurhikmah, 2019) Tidak saatnya lagi sekolah acuh terhadap sekolah lain. Kolaborasi yang saling membangun untuk mencapai tujuan pendidikan yang semakin bermutu harus di prioritaskan. Ego sektoral jangan lagi dipertahankan namun nilai-nilai kerjasama semakin diprioritaskan. Dinas pendidikan harus menginisiasi sinergitas antar sekolah/ lembaga pendidikan dengan membentuk wadah formal untuk mengupayakan kerjasama lintas sekolah (umpama Forum Kolaborasi Pendidikan, Aliansi Pendidikan Lokal). Segregasi antar lembaga pendidikan harus di urai dan melebur menjadi patner kerja yang konstruktif. Dalam kolaborasi, setiap stakeholders berpartisipasi penuh dalam pembentukan pola kerjasama dan bersedia menyumbangkan waktu, pengetahuan, keterampilan, dan informasinya atau sumber daya lainnya untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Parjaman, 2017). Dengan terlaksananya kerjasama yang mutualisme ini, maka akan ada solusi dalam setiap persoalan yang dihadapi guru atau sekolah. Kinerja guru akan meningkat dan optimal yang menghasilkan mutu pendidikan semakin jauh lebih baik.

4.3. Mengalakkan integrasi teknologi pendidikan

Kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap cara belajar dan mengajar di era modern. Kehadiran berbagai perangkat digital, aplikasi pembelajaran, serta platform pendidikan daring membuat proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, interaktif, dan mudah diakses oleh banyak orang. Model pembelajaran yang sebelumnya bersifat konvensional kini berkembang menjadi lebih fleksibel karena siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi ini membuka peluang besar bagi dunia pendidikan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih kreatif, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. (Agustian et al., 2021) Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mengambil langkah yang lebih aktif dan terencana agar pemanfaatan teknologi benar-benar memberikan dampak positif. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah peningkatan literasi digital bagi guru maupun peserta didik. Kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan produktif menjadi kebutuhan utama agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penggunaan perangkat, tetapi juga pada kemampuan memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Selain peningkatan kompetensi, dukungan fasilitas juga sangat diperlukan. Banyak sekolah, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi, masih mengalami kesulitan dalam mengakses perangkat teknologi dan jaringan internet yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperluas bantuan pembiayaan dan penyediaan sarana digital agar seluruh sekolah memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi pendidikan. Dengan tersedianya akses terhadap media pembelajaran digital, platform daring, dan sumber belajar interaktif lainnya, proses belajar mengajar dapat berkembang menjadi lebih inovatif, inklusif, dan mampu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

4.4. Peningkatan pelatihan dan pengembangan kualifikasi guru

Menyikapi implementasi kurikulum merdeka belajar maka pemerintah dan lembaga pendidikan wajib melaksanakan diklat sehingga akan meningkatkan kinerja dan kemampuan pendidik di lembaga tersebut. Diklat atau pelatihan terdiri dari diklat dasar, diklat lanjut dan diklat mahir (Eliza, 2022). Diklat akan memberikan ruang bagi guru untuk memperdalam ilmu pengetahuan sehingga akan memperkaya wawasan dalam

menciptakan metode, strategi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi pendidikan yang baru sehingga guru akan lebih inovatif.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan lembaga pendidikan wajib harus mengadakan pendidikan dan pelatihan dengan metode “jemput bola”. Tim akselerasi harus dibentuk dan ditugaskan mendatangi sekolah atau guru sehingga proses pendidikan dan pelatihannya intensif. Lembaga pendidikan dan guru direspon dan didengar apa yang menjadi persoalan mendasar. Sebab persoalan dari berbagai sekolah dan guru sangat bervariasi dan unik. Identifikasi masalah wajib dilakukan karena persoalan kompetensi guru sangat beragam dan unik sehingga penanganannya berbeda. Dengan pendekatan yang integratif akan meningkatkan hasil yang terbaik. Diklat akan membantu guru memahami cara mengatasi tantangan yang lebih spesifik dalam kurikulum merdeka belajar, seperti manajemen kelas, proses evaluasi, pemanfaatan aplikasi teknologi pendidikan dan sebagainya. Oleh Sebab itu penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memfasilitasi dan mendukung guru untuk mengikuti diklat-diklat. Selain itu insentif seperti pemberian sertifikat dan kredit point bagi guru yang mengikuti di berikan.

4.5. Pemantauan dan evaluasi berkala

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah memerlukan proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan dengan tujuan mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. (Laksono, 2022) Langkah ini penting untuk mengetahui sejauh mana kurikulum tersebut diterapkan secara efektif serta untuk melihat berbagai kendala yang muncul di lapangan. Setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari segi fasilitas, kualitas sumber daya manusia, maupun dukungan lingkungan belajar. Oleh karena itu, pemantauan yang rutin akan membantu pemerintah dan lembaga pendidikan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai keberhasilan maupun hambatan yang dialami oleh masing-masing sekolah. Apabila berbagai masalah dalam implementasi kurikulum dibiarkan tanpa penanganan yang cepat, dampaknya dapat semakin meluas. Hambatan yang tidak segera diatasi berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, mengurangi semangat kerja guru, serta menimbulkan ketidakpuasan di lingkungan pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi citra lembaga pendidikan dan menghambat pencapaian tujuan kurikulum itu sendiri. Karena itu, hasil evaluasi harus diikuti dengan langkah nyata berupa pendampingan, pelatihan tambahan, maupun penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Melalui evaluasi yang terstruktur, pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan yang paling tepat bagi setiap sekolah. Sekolah yang kekurangan fasilitas teknologi dapat memperoleh dukungan sarana, sementara sekolah yang membutuhkan peningkatan kompetensi guru dapat diberikan pelatihan yang relevan. Pendekatan seperti ini akan membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Dengan demikian, setiap peserta didik, tanpa memandang kondisi ekonomi maupun lokasi geografisnya, memiliki kesempatan yang lebih adil untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman.

5. KESIMPULAN

Penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, kreatif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini dirancang agar siswa memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan potensi, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun memiliki tujuan yang positif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Keberhasilan sebuah kurikulum tidak hanya ditentukan oleh konsep yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sarana pendukung, kualitas sumber daya manusia, serta kondisi sekolah di berbagai daerah. Pada kenyataannya, masih terdapat sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas belajar, akses teknologi, maupun dukungan anggaran. Kondisi tersebut membuat proses implementasi Kurikulum Merdeka belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, guru juga menghadapi tuntutan baru dalam merancang pembelajaran yang lebih kreatif dan berpusat pada siswa. Tanpa pelatihan dan pendampingan yang memadai, perubahan ini justru dapat menambah tekanan dan beban kerja tenaga pendidik. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam penguasaan metode pembelajaran inovatif, penggunaan teknologi pendidikan, serta sistem penilaian yang lebih adaptif. Selain peran pemerintah, keberhasilan kurikulum juga membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, seperti orang tua, sekolah, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih mendukung dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan dukungan infrastruktur, pelatihan, serta kerja sama yang berkesinambungan, Kurikulum Merdeka diharapkan mampu menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan relevan dengan tantangan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, U., Niar, H., & Salsabila. (2021). PERAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAMPEMBELAJARAN. *Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 3.
- Anindito Aditomo, P. D. (2018). Ketimpangan Mutu dan Akses Pendidikan di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015. *Kilas Pendidikan*, 17.
- Baharudin, H. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem kepemimpinan Kepala Madrasah. *Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid*, 6(1), 1–26.
- Eliza, D. (2022). Jenis-Jenis Pelatihan Peningkatan Profesional Guru PAUD di Indonesia. *JURNALBASICEDU*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3055>
- H.A.R, T. (2006). *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Rineka Cipta.
- HR, S., & Wakia, N. (2021). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi. *ADAARA : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.35673/ajmpi.v11i2.2149>
- Jamun, Y. M. (2018). DAMPAK TEKNOLOGI TERHADAP PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 10(1), 48–52. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v10i1.54>
- Jannah, F. (2022). PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR 2022. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan*, 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ay.v4i2.36>
- Katiningsih, E. D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto.
- Komari, Aslan, & Rusiadi. (2025). *POTRET TANTANGAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA*. 615–624. <https://doi.org/https://doi.org/10.47353/bj.v5i4.616>
- Laksono, T. A. (2022). Evaluasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3>
- Nasution, E. (2016). Problematika Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 1.
- Nurhikmah, I. (2019). PERAN KELOMPOK KERJAGURU (KKG) DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU. *AL – KAFF: JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 2.
- Nusran. (2018). PENGARUH PENGALAMAN KERJA, PEMBERIAN INSENTIF DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA GURU DI SMA 27 BONE. *Yume ; Jurnal of Mangement*, 1.
- Parjaman, H. T. (2017). KOLABORASI ANTAR INSTITUSI DALAM OPTIMALISASI PROGRAM “BANJAR CERDAS” PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA BANJAR. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/dak.v4i4>
- Qomariyah, N. (2022). Transisi Kurikulum 2013 Menjadi Kurikulum Merdeka: Peran dan Tantangan dalam Lembaga Pendidikan. *ISLAMIC RELIGION EDUCATION CONFERENCE I-RECON2022*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/gdcs.v10i1>
- Sanjaya, H. W. (2016). *PENELITIAN TINDAKAN KELAS*. Prenada Media.
- Suhandani, D., & Kartawinata, J. (2014). Identifikasi Kompetensi Guru Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik Di Kabupaten Sumedang (Kajian Pada Kompetensi Pedagogik). *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(2). <https://doi.org/10.17509/mimbar-sd.v1i2.874>
- Suhandi, A. M. (2022). Guru dan Tantangan Kurikulum Baru: Analisis Peran Guru dalam Kebijakan Kurikulum Baru. *Jurnal Basicedu*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3172>
- Tedjawati, J. M. (2011). *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Lesson Study : Kasus Di Kabupaten Bantul*. 17.
- Winandar, M. L. (2022). Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar di Desa dan di Kota. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Dan Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/naturalistic.v6i2.1684>